



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 831/IX/2014

I/SEPTEMBER 2014



Pengiriman Buku Paket K 2013 Bermasalah

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA SEPTEMBER 2014

Kegiatan DPR RI pada minggu pertama bulan September 2014 di isi dengan Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Panas Bumi dan Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI pada Masa Persidangan I TS 2014

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Panas Bumi

RUU ini terdiri dari 12 Bab dan 86 pasal. Ada beberapa alasan mengapa RUU panas bumi ini sangat diperlukan. Menurut Pemerintah selaku pengusul RUU, alasan diperlukannya UU tentang panas bumi antara lain: (1) Indonesia mempunyai sumber potensi panas bumi yang besar, yang lokasinya tersebar sepanjang gunung api aktif, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Sulut dan Maluku. Pemanfaatan sebagai energi, khususnya listrik saat ini masih sangat kecil dibanding potensi yang ada. (2) Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya jumlah penduduk, mengakibatkan kebutuhan Indonesia akan energi terus meningkat (*energy demand*), namun tidak diimbangi dari sisi penyediaan energi (*energy supply*), sehingga pemanfaatan energi terbarukan untuk listrik yang berasal dari panas bumi, perlu ditingkatkan. (3) Panas Bumi merupakan sumber energi terbarukan, apabila dikembangkan sebagai energi listrik, juga merupakan energi yang ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (4) Optimalisasi pemanfaatan panas bumi di seluruh Indonesia saat ini mengalami berbagai kendala, antara lain pengembangan panas bumi yang berada di wilayah konservasi. Masalah-masalah tersebut kemudian tertuang di dalam penjelasan atas RUU tentang panas bumi. Bahkan di dalam penjelasan dikatakan, sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, bahwa panas bumi merupakan kekayaan alam yang harus dikuasai negara dan dikelola untuk sebesar kesejahteraan rakyat. Tanggung Jawab Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan panas bumi.

Dengan demikian, pemanfaatan panas bumi dapat mem-



bantu program pemerintah untuk pemanfaatan energi bersih yang sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Panas bumi belum dimanfaatkan secara optimal karena sebagian besar berada pada daerah terpencil dan kawasan hutan yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Dalam jangka panjang, harga listrik yang dihasilkan oleh panas bumi lebih kompetitif dan lebih handal jika dibandingkan dengan pembangkit listrik dari fosil sehingga pemerintah perlu meletakkan kewenangan penyelenggaraan panas bumi kepada Pemerintah. Pemerintah melakukan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, dibagi kepada Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Landasan hukum yang ada, yaitu

UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pelaksanaannya belum dapat menjawab tantangan dalam pengembangan panas bumi secara optimal. Oleh karena itu, UU baru perlu dibentuk untuk menggantikan UU No.27 tahun 2003 untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan panas bumi.

Pada Rapat Paripurna tanggal 26 Agustus, juga telah mendapatkan keputusan bahwa RUU Inisiatif Komisi I menjadi RUU DPR-RI tentang Radio Televisi Republik Indonesia. Intisari atas RUU ini adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutanannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) merupakan salah satu lembaga yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. LPP pada saat ini dilakukan oleh TVRI dan RRI. Dalam rangka memberikan efektifitas dan peran aktif dalam membangun bangsa, maka LPP TVRI dan LPP RRI perlu dijadikan satu menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Hal ini untuk memberikan kejelasan mengenai status kelembagaan RTRI dan meningkatkan kinerja dan juga peran dalam memberikan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan. Pentingnya RTRI sebagai alat untuk mempersatukan bangsa dan negara, menjadikan salah satu hal yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan setingkat UU. Salah satu pasal penting yang ada dalam RUU ini antara lain adalah pasal 7 mengenai kedudukan RTRI sebagai lembaga negara penyelenggara penyiaran publik Republik Indonesia dan pasal 9 mengenai sistem penyiaran. Pertama RTRI menyelenggarakan siaran dengan sistem penyiaran nasional dan berjangkauan wajib menjangkau seluruh wilayah NKRI. Kedua, sistem penyiaran nasional berjangkauan ebagaimana dimaksud ayat pertama, RTRI menyelenggarakan sistem penyiaran lokal dan sistem penyiaran regional. Ketiga, selain menyelenggarakan siaran sebagaimana ayat (1) dan (2), RTRI dapat menyelenggarakan siaran internasional. RUU ini terdiri dari 15 bab dan 97 pasal.

Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII

Rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama mengesahkan "Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M dan Penundaan Program Pembayaran DAM

Jemaah Haji secara Kolektif melalui Pembiayaan Dana Optimalisasi". Sejumlah kesimpulan yang ada dari Rapat tersebut adalah: (1) Komisi VIII DPR RI mengapresiasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/2014 M dan memberikan catatan agar: a) Pemerintah terus meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi Jemaah Haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama, b) Pengisian kuota sisa dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan mekanisme yang jelas dan c) Proses kerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa bagi jemaah haji Indonesia dilakukan dengan transparan dan provider yang terpercaya.

(2) Terkait dengan kebijakan pembatalan program pembayaran DAM jemaah haji secara kolektif melalui pembiayaan dana optimalisasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1435 H/2014 M, maka Komisi VIII DPR RI berpandangan: a) Bahwa dana optimalisasi yang dapat digunakan Kementerian Agama RI untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1435 H/2014 M sebesar maksimal (paling banyak) Rp. 2.779.723.354.556 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh dua puluh tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi biaya DAM sebesar Rp. 206.691.712.800 (dua ratus enam milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah dan) b) Berkenaan dengan potensi efisiensi perumahan di Mekkah dan Madinah, Komisi VIII DPR RI meminta kepada Kementerian Agama RI untuk dilakukan kajian mengenai pengembaliannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. ***

Pengiriman Buku Paket K 2013 Bermasalah

Hampir semua sekolah di daerah-daerah mengeluhkan hal yang sama. Buku paket kurikulum 2013 (K13) belum serentak diterima di sekolah-sekolah. Setidaknya inilah yang terekam dari hasil kunjungan kerja (Kunker) spesifik Komisi X DPR RI ke Jayapura, Papua dan Manado, Sulawesi Utara.

Dari 9 sekolah di Jayapura yang dikunjungi, baik SD, SMP, dan SMA/SMK, seluruhnya belum menerima buku paket K13 yang terdiri dari buku siswa dan buku guru. Sepanjang Selasa (2/9), Komisi X menyisir sekolah-sekolah dari semua jenjang untuk mengetahui problem penerapan K13 tersebut.

Buku paket K13 yang belum diterima itu, tentu menyulitkan kepala sekolah dan para guru dalam menentukan kebijakan belajar mengajar di sekolahnya masing-masing. Di SD



Tim Kunker Spesifik Komisi X DPR yang dipimpin Syamsul Bachri berkunjung ke Jayapura, Papua

Inpres Kotaraja, Jayapura, misalnya, karena buku siswa dan guru belum diterima, sekolah pun mengopi buku paket yang ada terlebih dahulu untuk melakukan penyesuaian dengan K13 ini.

Sifried Daullu, Kepala SD Inpres Kotaraja mengaku, terseok-seok menyiapkan K13 di sekolahnya. Buku paket hasil fotokopi itu dibagikan kepada para siswa dengan harga yang murah hanya sebagai pengganti biaya fotokopi. Namun, bagi siswa miskin, buku-buku tersebut diberikan secara gratis.

Sifried juga mengeluhkan, selama ini di setiap SD tidak pernah ada tenaga tata usaha (TU) yang mengurus administrasi sekolah. Para guru SD biasanya merangkap sekaligus sebagai tenaga TU. Ini tentu saja merepotkan para guru di sekolahnya, apalagi sudah ada pemberlakuan K13 yang sudah banyak menyita waktu para guru. Berbanding terbalik dengan SMP dan SMA yang selalu punya beberapa tenaga TU. Ini harus jadi perhatian dinas pendidikan, terutama pemerintah pusat.

Syamsul Bachri (F-PG) Ketua Tim Kunker Komisi X DPR ke Jayapura, saat melakukan pertemuan dengan Asisten I Bidang Pemerintahan, Provinsi Papua, menegaskan, pemberlakuan K13 bukan sebagai alat uji coba, karena bisa merugikan para siswa. Program ini membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Program ini memang harus diberlakukan sebagai bonus demografi di Indonesia. Untuk itu, penerapannya berbeda-beda di setiap daerah. "Tidak mungkin penerapan kurikulum 2013 disamaratakan," katanya saat memberi sambutan di Kantor Gubernur Papua. Harbiah Salahuddin (F-PG) Anggota Komisi X yang ikut dalam kunjungan tersebut, mengatakan, mestinya kalau sudah diberlakukan, tidak ada lagi persoalan di lapangan.

Saat meninjau pemberlakuan K13, Tim Kunker sampai memecah para anggotanya menjadi dua tim agar dapat

mengunjungi banyak sekolah sekaligus juga mendapat banyak masukan dan informasi dari sekolah-sekolah di Jayapura. Selain SD Inpres Kotaraja, sekolah-sekolah yang dikunjungi itu, di antaranya SMPN 2 Jayapura, SMPN 5 Jayapura, SMKN 3 Jayapura, dan SMANKOR (sekolah khusus olahraga).

Para anggota Komisi X yang ikut meninjau pemberlakuan K13 adalah Harbiah Salahuddin (F-PG), Linda Megawati (F-PD), Ada Riyanti (F-PD), Nurul Qomar (F-PD), Diaz Gwijangge (F-PD), Herlina Amran (F-PKS), Nasrullah (F-PAN), Machmud Yunus (F-PPP), dan Budi Heryadi (F-Gerindra).

K13 di Manado

Sementara itu, Tim Kunker Komisi X yang bertugas ke Manado, Sulawesi Utara, dipimpin Agus Hermanto (F-PD) juga menyorot hal yang sama. Persoalan distribusi buku paket K13 ke sejumlah daerah terkendala oleh akomodasi, lantaran percetakannya ada di Jakarta. Anggota Komisi X Tamsil Linrung yang turut serta dalam Kunker

ungkap Tamsil Linrung, saat mengikuti pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Djouhari Kansil, Senin (1/9).

Pencetakan buku yang terkonsentrasi di Jakarta justru menyulitkan distribusi ke daerah. Daerah pun tak bisa berbuat banyak dengan kondisi ini. Padahal, kata Tamsil, bila distribusi buku diserahkan ke daerah tentu persoalan keterlambatan bisa diminimalisir. "Kalau pencetakan buku ini diserahkan kepada daerah mungkin itu lebih baik, tapi kalau semuanya dipaksakan dengan tersentralisasi dari pusat ini tidak benar," kata Tamsil, seraya menambahkan bahwa ini satu kebijakan yang keliru.

Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Djouhari Kansil, menjelaskan bahwa sampai tanggal 30 Agustus 2014 distribusi buku yang masuk dan disalurkan melalui Kantor Pos, baru sebanyak 5 kontainer dari 23 kontainer untuk 3 daerah kepulauan dan sebagian kota Bitung. Buku-buku tersebut khusus untuk SMP.



Tim kunjungan spesifik Komisi X DPR ke Manado

mengeritisi sistem distribusi buku tersebut. Idealnya, buku paket untuk sekolah-sekolah di daerah mestinya dicetak di daerah setempat. Selama ini buku paket malah dicetak di Jakarta.

"Dana sudah dikucurkan dari pusat ke daerah dan daerah sudah memegang dananya. Tetapi pencetakan bukunya di Jakarta. Kemudian dana yang sudah ada di daerah dikirim kembali ke pusat untuk pengelolaan pencetakan buku. Ini sesuatu yang tidak logis,"

Djouhari berharap, buku paket K13 harus segera dicetak dan didistribusikan ke sekolah mengingat pengadaan buku untuk semester 2 akan segera berjalan melalui dana DAK Bidang Pendidikan. Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan harus dikeluarkan secepatnya khusus untuk pengadaan dan pengiriman buku.

Selain Agus Hermanto sebagai Ketua Tim, Komisi X yang turut dalam rombongan Kunker tersebut adalah Rinto Subekti (F-PD), Selina Gita (F-PG), Popong Otje Djundjungan (F-PG), Zufadhli (F-PG), Irsal Yunus (F-PDI Perjuangan), Dedi S Gumelar (F-PDI Perjuangan), Ahmad Zainuddin (F-PKS), Tamsil Linrung (F-PKS), Eko Hendro Purnomo (F-PAN), Reni Marlinawati (F-PPP), M. Hanif Dhakiri (F-PKB), Nuroji (F-Gerindra), Jamal Mirdad (F-Gerindra), dan Muchtar Amma (F-Hanura). (mh/iw) foto: iwan armanias, husen/parle/iw.



DPR Minta Pemerintah Awasi Implementasi Dana Desa

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mengalokasikan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 640 triliun. Dari dana sebesar itu, dialokasikan sebesar 10 persen untuk dana desa. Setidaknya, Rp 64 triliun dialokasikan untuk 73 ribu desa. Namun realisasinya, dana desa hanya sebesar Rp 9,1 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Andi Rahmat menyatakan, implementasi dana desa ini harus diawasi. Berkaca dari pengalaman di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2006, dimana sebagian pelaksana PNPM tersandung ranah hukum.

“Di Dana Desa ini, yang utama itu bukan hanya besaran dananya, tapi kombinasi antara pemberian uang dengan mudahnya mekanisme pertanggungjawaban,” jelas Andi usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur BI, dan Kepala BPS di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Rabu (3/09).

Politisi PKS ini menambahkan skema PNPM yang diterapkan itu tidak memenuhi azas resiko, hanya menghamburkan uang saja. Desa yang sudah dipilih, namun aparat desanya tidak terlatih memaksimalkan dana yang ada. Hal ini bisa menjadi objek investigasi BPK, karena Kepala Desa ini sudah menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.

“Saya meminta, aturan itu dibuat, tetapi memberi ruang gerak kepada aparat desa untuk belajar. Sepuluh persen dari 73 ribu desa ini sudah 7300 desa. Kalau 10 persennya bermasalah, bisa menjadi isu nasional. Probleminya lebih endemik dan laten,” tambah Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan ini.

Untuk itu, ia juga meminta kepada pemerintah baru untuk menyiapkan skema Dana Desa ini. Pasalnya, jika sampai 73 ribu desa ini bermasalah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah yang baru.



Jajaran Pimpinan Komisi XI DPR

“Ini masif sekali. Ini harus dikoordinasikan secara teknis dengan BPK dan BPKP, untuk memitigasi resiko hukum dan resiko pelaksanaan,” imbuh Andi.

Sebagai informasi tambahan, Dana Desa merupakan salah satu bagian dari dana transfer ke daerah, yang menurut amanat UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penyaluran Dana Desa kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme transfer dengan memperhatikan beberapa indikator, antara lain seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah serta tingkat kesulitan geografis. Selain Dana Desa, setiap desa juga mendapat alokasi dana yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota berupa, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, sebesar kurang lebih 10 persen.

Desa juga mendapatkan alokasi dana desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten maupun kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, serta bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten maupun kota. (sf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

RUU Tapera Mentah Kembali di Tingkat Pemerintah

RUU Tapera mentah kembali di tingkat Pemerintah, Pasalnya belum ada kesatuan pendapat antar Kementerian terkait penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) tunggal dalam RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Secara informal pada tanggal 28 Agustus lalu kita telah mengundang

Menpera dan telah sepakat bulat bahwa Panja harus dilanjutkan sebelum masa sidang berakhir,” kata Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi saat RDP dengan perwakilan Pemerintah, di Gedung Pansus C, Nusantara II, Rabu, (3/9).

Dia mengatakan, Rapat akan kembali dibahas setelah tanggal 15 September



Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi



setelah RUU Taper disampaikan kepada Wapres. “Kita ingin DPR segera menuntaskan RUU Taper ini sebelum tanggal 29 September, setelah Pemerintah melakukan koordinasi dengan Menpera, BUMN, Menkokesra hingga disepakati DIM Tunggal RUU Taper,” ujarnya.

Menurutnya, RUU ini merupakan terobosan untuk menangani *Backlog*

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses kredit. “RUU Taper merupakan RUU yang menjadi terobosan dalam penyediaan rumah bagi masyarakat yang tidak punya akses terhadap kredit,” tandasnya.

Bagi DPR, terangya, pemerintah bisa menyelesaikan persoalan DIM RUU Taper dengan membuat sema-

cam peraturan pemerintah. “Yang krusial didalam RUU ini yaitu menyangkut pemanfaatan dana Taper, serta iuran dana Taper. Sebelumnya ada perdebatan di tingkat kementerian bahwa pemanfaatan dana Taper, Kementerian Keuangan bilang hanya untuk KPR saja, sementara Menpera mengusulkan dana tersebut bisa untuk membangun rumah,” jelasnya. (Sugeng Irianto/agung)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Jumlah Riil Peserta Jamkesmas Kembali Dipertanyakan

Komisi IX DPR kembali mempertanyakan jumlah riil peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Tentang kepesertaan PBI mohon untuk dilengkapi data, sebenarnya yang menjadi peserta Jamkesda dengan anggaran yang ditanggung APBN ada berapa? Dan angka 96,4 juta ini pastilah angka belum semuanya,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan RI membahas Anggaran Tahun 2015 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/9).

Menurut Rieke, seharusnya minimal dengan kondisi keuangan sekarang yang ditanggung oleh APBN adalah 120 juta orang. Karena dibalik angka ini adalah orang bukan sekedar angka.

“Oleh karena itu, maka tidak bisa hanya dilihat apakah ini bisa dihapus atau dikurangi karena kalau kita mau jujur mari kita buka data BPS,” ajak Rieke.

Dirinya mengaku selalu mengulang-ulang pertanyaan ini. Dari mana data BPJS, dari BPS, dari data Rumah Tangga Miskin. Dimana menurut Kementerian Kesehatan jumlah rumah tangga miskin 19,1 juta dikalikan empat totalnya 76,4 juta jiwa, itulah yang dipakai data Jamkesmas 2008 sampai dengan 2012.

“Padahal 2011 di BPS keluar data Rumah Tangga Miskin 25,2 juta jiwa. Jika logikanya dikalikan empat. Berar-



Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka

ti 100,8 juta. Berapa angka kelahiran baru, data dari BKKBN terjadi penambahan 4 sampai 5 juta per tahun, karena *family planning*nya tidak berjalan dengan baik,” papar politisi Fraksi PDI Perjuangan.

“Apakah memang kemudian kita mau mengeliminasi orang-orang yang sebetulnya berhak. Bahkan tidak perlu ada BPJS, tidak perlu ada SJSN, kalau mereka termasuk fakir miskin, orang terlantar itu harus ditanggung negara,” tambahnya.

Di kesempatan jabatan terakhir ini, Rieke minta dukungan Kementerian Kesehatan, jangan sampai terulang seperti penganggaran tahun kemarin dimana Panti Sosial kehilangan haknya yang tadinya Dewan bersama pemerintah berhasil memperjuangkan ada

cadangan untuk 2 juta orang.

Tapi menurut Rieke, ini bukan hanya kegagalan DPR. Tapi harus diakui juga sebagai kegagalan Kementerian Kesehatan. “Kita tidak bisa lagi memperjuangkan adanya dana cadangan untuk 2 juta orang,” tegasnya.

Kemudian terjadinya kasus-kasus penolakan dari rumah sakit, ungkap Rieke, kita tidak menyalahkan rakyat. Karena mereka memang tidak terdata.

Rieke mengajak untuk merubah cara pandang tentang angka-angka yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Anggota Komisi IX dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning.

“Ini bukan sekedar angka, tapi orang. 120 juta orang minimal. Itu yang kami ajukan,” tegas Rieke.

Dijelaskan Rieke, Anggota Komisi IX sudah berusaha keras untuk memperjuangkan, sampai melakukan interupsi kepada Menteri Keuangan di Paripurna DPR RI.

“Tetapi jika keyakinan ini tidak ada di teman-teman Kementerian Kesehatan, lalu bagaimana 120 juta orang,” imbuhnya.

Rieke juga mempertanyakan perubahan jumlah peserta Jamkesmas ke PBI? Yaitu 86,4. Berapa perubahan dari Jamkesda ke PBI. Berapa sebenarnya jumlah masyarakat miskin tidak mampu yang masih dibebankan kepada APBD.



Karena, menurutnya dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan berlakunya prinsip portabilitas kesehatan itu berlaku untuk seluruh

Indonesia. Dimana pun rakyat berada, dijamin kesehatannya.

Ditegaskan Rieke, Pemerintah Da-

erah diperbolehkan memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnya, tapi sifatnya tambahan. (sc)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Komisi VII DPR Setujui RUU Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas



Anggota DPR Siti Romlah menyerahkan Pandangan Fraksi Demokrat kepada Menteri LH

Komisi VII DPR menyetujui RUU Persetujuan Asean Tentang Pencemaran asap lintas Batas. Persetujuan ASEAN atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Pada kesempatan tersebut, Raker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan, di Gedung Nusantara I, Rabu, (3/9). "Indonesia merupakan sebuah negara besar dan merupakan keniscayaan serta memiliki peran penting dalam mencapai stabilitas ekonomi Asean," ujar Anggota DPR Siti Romlah dari Partai Demokrat saat menyampaikan pendapat Fraksinya dihadapan peserta Raker.

Di dalam kawasan Asean, lanjutnya, Indonesia sebagai negara besar harus saling bantu dan kerjasama antar kawasan. "Tujuan RUU yaitu untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat masyarakat. Indonesia Harus paling depan dalam merespon serta menindaklanjuti berbagai persoalan dimasa akan datang," tandasnya.

Dia menambahkan, sangat penting, Indonesia dapat berperan aktif dalam bentuk kerjasama dan konvensi di tingkat kawasan, yang bertujuan meningkatkan kemampuan negara dan kerjasama di lingkungan Asean. "Memang terjadinya pencemaran asap dapat membawa dampak negatif didalam negeri juga negara tetangga karena sangat krusial kita dapat ikut terlibat dalam mencegah pencemaran tersebut," tambahnya.

Hal yang bisa dilakukan, lanjutnya, yaitu melakukan Pengorganisasian, pengambilan keputusan terkait pencegahan kebakaran hutan di Indonesia. "Melalui MOU ini Indonesia sangat serius dan berkomitmen untuk mencegah kebakaran lahan. Kita memiliki mekanisme dan sistem lembaga bahkan masyarakat adat dalam pencegahan, pengelolaan kebakaran hutan," ungkapnya.

Sementara, Anggota DPR Bobby Adhityo Rizaldi (F-PG) mengatakan, RUU ini merupakan upaya kawasan Asean dalam melakukan kordinasi serta pencegahan asap lintas batas. "RUU ini mencakup peningkatan *capacity building*, pertukaran informasi dan kerjasama. artinya Tidak mengganggu kedaulatan NKRI dalam mencegah asap lintas batas," paparnya.

Menurut Bobby, Ratifikasi tidak boleh menghilangkan kedaulatan negara, memang ada kesan penanganan asap diintervensi negara lain. Namun RUU ini menjamin bahwa penanganan kebakaran lahan yang melibatkan negara lain dapat dimungkinkan jika mendapat persetujuan negara bersangkutan.

"Jangan sampai terganggu kedaulatan negara terkait kordinasi, pengendalian lahan, ini merupakan masalah bersama yang merupakan persoalan lingkup Asean," jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.

UU Rahasia Negara Perlu Batasan Khusus

Undang-undang Rahasia Negara sangat diperlukan, namun perlu batasan atau kedalaman khusus yang dimaksud dengan rahasia negara. Dengan kata lain perlu sebuah persamaan persepsi dari sebuah batasan rahasia negara yang dimaksud.

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua

Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin kepada Parleментарia usai menerima draf RUU Rahasia Negara dari Pemerintah, Selasa (2/9). Ditambahkan politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini, kedalaman rahasia negara yang dimaksud sangat diperlukan agar tidak menabrak Hak Asasi Manusia (HAM), namun integritas negara tetap terlindungi.



Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin

“Dalam rumah tangga saja ada rahasia keluarga, apalagi untuk sebuah negara. Ya perlu sebuah Undang-undang Rahasia Negara. Namun batasannya seperti apa, dan kedalaman dari sebuah negara seperti apa, ini yang harus dikaji lebih jauh, agar RUU Rahasia Negara ini nantinya tidak menabrak HAM, tetapi integritas negara tetap harus terlindungi,” jelas TB Hasanuddin.

Meski demikian menurutnya, saat ini Komisi I DPR belum pada tahap pembahasan, melainkan hanya menerima draft Rancangan Undang-undang yang menjadi usulan Pemerintah tersebut. Mengingat masa bhakti anggota DPR periode 2009-2014 yang akan segera berakhir, dan sistem legislasi dalam parlemen tidak mengenal sistem Carry Over atau pengalihan, namun karena

RUU Rahasia Negara ini telah menjadi bagian dari Prolegnas, maka draft RUU Rahasia Negara yang disampaikan pemerintah terhadap DPR tersebut bisa menjadi bahan catatan atau kajian tersendiri bagi anggota DPR periode mendatang. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Dewan Bahas Perubahan Tata Tertib DPR RI



Anggota DPR Ferdiansyah

Anggota DPR dari Partai Golkar Ferdiansyah mengatakan, tindak lanjut atas disahkannya UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Dewan tengah membahas perubahan tata tertib untuk DPR RI.

“Karena pembahasan rancangan perubahan tata tertib masih awal, maka harapannya akan kita coba selesaikan dipertengahan bulan September, supaya apa? Supaya nanti masih ada waktu bagi teman-teman, dalam rangka persiapan untuk pelantikan anggota DPR yang baru 1 Oktober mendatang,” jelas Ferdi disela-sela rapat Pansus pembahasan Rancangan peraturan tata tertib DPR RI, di Jakarta, Rabu (3/9).

la menambahkan, niat baik pembahasan tata tertib ini mempersiapkan anggota DPR periode 2014-2019 agar punya acuan pelaksanaan UU MD3 yang baru.

Selanjutnya Ferdi menjelaskan, isu yang paling utama dalam pembahasan tata tertib ini adalah tata cara pemilihan pimpinan DPR.

“Kalau dalam UU MD3 sudah diputuskan bahwa pemilihan pimpinan DPR dipilih dan oleh anggota, tapi kan sedang digugat supaya pemilihan itu ditetapkan berdasarkan hasil pemilu, dan kalau berdasarkan hasil pemilu berarti itu tetap tidak sesuai dengan UU No.17 Tahun 2014, makanya sekarang sedang digugat ke MK untuk dilakukan *Judicial Review* terhadap UU MD3 terkait dengan tata cara pemilihan pimpinan DPR,” jelasnya.

Ditempat yang sama anggota DPR Max Sopacua menilai pembahasan tata tertib ini adalah rujukan dari UU MD3 yang telah diputuskan, dan ada beberapa perubahan namun tidak banyak.

la mengatakan, nanti dalam pembahasan akan ada usulan-usulan, dan tidak tertutup kemungkinan, keputusan yang sudah dibuat dalam UU MD3 itu adalah bagian yang paling integral.

Politisi dari Partai Demokrat ini berharap tata tertib ini nantinya akan lebih baik, artinya mereka anggota DPR baru punya hak-hak yang lebih banyak diakomodasi sebagai anggota DPR. “Tinggal dimanfaatkan secara rasional saja dan jangan tidak rasional dipergunakan,” tegasnya. (nt)/foto:rizka/parle/iw.

Pansus RUU Advokat Tetapkan Mekanisme dan DIM Pembahasan

Panitia Khusus (Pansus) DPR RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM melakukan Rapat Kerja untuk penetapan jadwal dan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-

Undang (RUU) usul inisiatif DPR RI tentang Advokat yang telah diklaster sedemikian rupa supaya pembahasan lebih efektif.

“Kita lakukan pembahasan se-efektif mungkin, waktu hampir 3 minggu ke depan, sebab tanggal 30 September periode DPR sekarang ini berakhir. Saya harap Anggota Pan-

sus dan Pemerintah bisa lebih fokus memberikan perhatian dalam rangka pembahasan RUU tentang Advokat,” kata Ketua Pansus Advokat Sarifuddin Sudding, Rabu (3/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Sudding menerangkan bahwa terdapat 345 DIM yang telah diklaster, menjadi 213 bersifat tetap, 21 bersifat redaksional, 78 bersifat substansi, 6 DIM substansi baru, dan 27 DIM Penjelasan.

“Hal substansi dalam RUU diantaranya ada beberapa hal yang baru yaitu tentang pembentukan Dewan Advokat Nasional, dan Majelis Kehormatan Advokat,” papar Sudding dengan menambahkan bahwa pengalaman dalam Kunjungan Kerja Pansus ke beberapa daerah antara organisasi dengan organisasi yang satu tidak saling bersinergi. Itu yang tidak diharapkan.

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dalam raker tersebut menyatakan bahwa unsur yang mewakili Pemerintah antara lain Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Kemendiknas dan Kemensekneg.

Raker ini merupakan Rapat ke-dua antara Pemerintah dengan DPR RI untuk membahas Rancangan UU tentang Advokat, sebelumnya pada tanggal 21 November 2013 telah dilak-



Ketua Pansus Advokat Sarifuddin Sudding

sanakan rapat kerja pertama dengan agenda penyampaian pandangan dan pendapat Presiden terhadap RUU tentang Advokat.

Selanjutnya, Amir Syamsuddin menjelaskan beberapa hal yang perlu dibahas dalam Pansus antara lain urgensi dan prioritas dilakukannya perubahan UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat memenuhi azas tujuan serta azas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Kedua, syarat pengangkatan sebagai advokat agar dapat menjamin tingkat profesionalitas seorang advokat. Perlu dibahas mengenai usia minimum untuk diangkat sebagai advokat dan

batas atas usia minimum untuk diangkat sebagai advokat, serta batas masa lima tahun untuk mantan jaksa, polisi, penyidik pegawai negeri dan hakim yang dapat diangkat sebagai advokat.

Ketiga, pengambilan sumpah dan janji. Perlu dipertimbangkan pengambilan sumpah dan janji yang dilakukan oleh organisasi advokat, mengingat profesi advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam rangka penegakan supremasi hukum dalam lingkup sistem peradilan.

Keempat, organisasi advokat. Memperhatikan kepentingan peningkatan kualitas profesi advokat sebagai wadah bagi para yang mulia *officium nobile*, dan sebagai profesi yang mandiri advokat memerlukan suatu wadah yang berfungsi untuk menciptakan dan menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi tersebut. “Diperlukan organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan perkembangan kebutuhan profesi advokat yang sekaligus juga berperan untuk dapat meningkatkan kualitas profesi advokat,” tegasnya.

Sedangkan kelima, Dewan Advokat Nasional, Pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan Dewan Advokat Nasional, namun perlu pembahasan secara mendalam. (as) foto: *iwan armanias/parle.*

Timwas DPR Minta Percepat Penanganan Hukum Tersangka yang Melarikan Diri

Timwas Century DPR mendorong percepatan proses penanganan hukum terkait kasus Bank Century termasuk tersangka yang melarikan diri. Dengan demikian aset-aset terkait kasus tersebut segera dapat dibekukan dan disita.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan rapat kerja Tim Pengawas Century DPR dengan Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto dan Kabareskrim Polri Komjen Suhardi Alius di gedung DPR, Senayan, Rabu (3/9).

Dalam acara yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, Timwas DPR mengapresiasi laporan rekapitulasi penanganan baik tindak pidana umum, pidana perbankan, pencucian uang maupun tindak pidana korupsi yang disampaikan Kapolri dan Jaksa Agung.



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman saat memimpin Rapat Century

Meski demikian, Timwas meminta Kapolri, Jaksa Agung dan KPK untuk melengkapi laporan tersebut dengan rekapitulasi seluruh penanganan hukum terkait kasus Bank Century paling lambat minggu kedua bulan September ini. Laporan tersebut juga diminta dilengkapi dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani tindak pidana tersebut.

Usai acara tersebut, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan raker kali ini membahas rekapitulasi untuk kepentingan Timwas Century sebagai pertanggungjawaban di akhir masa jabatan. Rekap tadi sudah disampaikan walaupun belum sempurna nanti akan ada kordinasi bahkan Timwas DPR akan terus meminta informasi kepada pemerintah. “Dalam beberapa kasus memang ada yang di luar negeri dan secara hukum sudah ada keputusan, tapi kemudian ada perlawanan hukum para tergugat,” katanya.

Di sisi lain, diakui memang diantara kita belum ada persepsi seragam putusan di pengadilan, sehingga ada kasus Lapangan Golf ketika pemerintah menang, tetapi anehnya

pihak yang ketempatan barang itu divonis bebas. Ini menjadi aneh. “Walaupun kita menghormati proses hukum tetapi perlu dipertanyakan dan akhirnya Kejagung kemudian melakukan upaya hukum,” jelasnya.

Pimpinan Dewan dari Fraksi PKS ini mengakui melihat perkembangan penanganan kasus Century ini kelihatannya tidak tuntas, tetapi setidaknya DPR bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ke publik secara detail termasuk masalah dan kendalanya. Timwas DPR berharap, DPR yang akan datang juga memikirkan kasus ini seterusnya dan bisa melakukan pengawasan.

Saat didesak kemungkinan DPR periode mendatang tidak membentuk Timwas lagi, tidak apa-apa. Namun pemerintah tetap berkewajiban untuk meneruskan kasus ini hingga selesai baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian harus tetap melanjutkan. “Tidak bisa berhenti gara-gara Timwas DPR sekarang telah berakhir. Kasus tersebut tetap harus dituntaskan oleh pemerintah,” kata Sohibul menambahkan. (mp)/foto:rizka/parle/iw.

AIPA Gelar Perayaan Ulang Tahun ke-37

Tepat hari Selasa, (2/09), ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), berumur 37 tahun. Untuk itu, ada inisiatif untuk memperingati ulang tahun forum antar negara di ASEAN ini. Bertempat di lobby Gedung Nusantara, acara berlangsung dengan meriah.

Hadir pada acara ini, Sekretaris Jenderal AIPA PO Ram, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Ketua BKSAP Surahman Hidayat. Turut hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti beserta jajarannya, perwakilan dari negara anggota AIPA, serta ambassador dari negara-negara observer.

Usai acara, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, kehadiran AIPA sangat mewarnai kegiatan Parlemen Indonesia. Mengingat Sekretariat AIPA ada di Jakarta, ditambah Sekretariat ASEAN juga ada di Jakarta, sehingga kebanyakan kegiatan dilakukan di Indonesia.

“Selama lima tahun ini, ASEAN region tumbuh secara ekonomi menjadi lebih kuat, maka dunia melihat bahwa ASEAN menjadi alternatif kekuatan ekonomi dunia yang baru,” ujar Pramono.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, Indonesia mempunyai peran



Wakil Ketua DPR Pramono Anung didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat saat menghadiri Ulang Tahun AIPA

yang signifikan dan strategis. Jika pertumbuhan ekonomi dapat dijaga pada rata-rata 5 persen, ASEAN bisa menjadi kekuatan yang luar biasa.

“Ada Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya, mudah-mudahan hal ini dapat menunjukkan kepada dunia, selain ekonomi tumbuh, ASEAN juga menjadi tempat politik yang stabil. Ini keuntungan bagi kita,” imbuh Pram, sapaan akrab Pramono.

Di umur yang sudah menginjak 37 tahun ini, Pramono berharap AIPA bisa berperan lebih besar di tahun-tahun mendatang. Apalagi, tahun mendatang sudah menjadi ASEAN Community, sehingga batas-batas di negara-negara ASEAN semakin mengecil. Ia juga berharap, peran Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar, dapat meningkatkan perannya.

Sementara, Sekjen AIPA PO Ram



menyatakan bahwa ini merupakan kesempatan pertama menyelenggarakan perayaan ulang tahun. Dalam pidatonya, ia menyatakan terima kasih kepada seluruh perwakilan anggota AIPA yang telah membantu memberikan informasi dan kontak dengan Parlemen.

“Kami berharap, diwaktu mendatang, negara anggota dan seluruh masyarakat ASEAN semakin memahami peran AIPA. Kami juga akan terus menyerukan pesan kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia,” ujar Ram.

Acara berjalan dengan meriah. Se-

belum acara dimulai, para undangan yang hadir diajak untuk melakukan *tour building* di Gedung Nusantara, dan diakhiri dengan pemotongan kue. Turut meramaikan acara, tampil para penari membawakan salah satu tarian tradisional Indonesia. (sf), foto: rizka/parle/eka hindra.

Pleno Baleg Setujui RUU Kesetaraan Gender

Rapat Pleno Baleg DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) usul Komisi VIII DPR menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi VIII, untuk kemudian diteruskan kepada Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.

Dalam Pleno Baleg yang dipimpin Ketua Baleg, Ignatius Mulyono, enam fraksi dapat menerima RUU KKG untuk dilanjutkan pembahasannya di Komisi VIII dan diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi VIII serta diteruskan ke Paripurna DPR untuk diambil keputusan. Dua fraksi menolak RUU KKG dan satu fraksi belum bisa menerima hasil harmonisasi RUU KKG.

Keenam fraksi yang menyetujui, yaitu Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PPP. Dua fraksi yang menolak yaitu Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra. Sementara satu fraksi yang belum bisa menerima yaitu Fraksi PAN.



Wakil Ketua Baleg DPR Abdul Kadir Karding

Sebelumnya, Ketua Panja RUU KKG yang juga Wakil Ketua Baleg, Abdul Kadir Karding dalam laporannya kepada Pleno Baleg menyatakan Panja telah melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang KKG dengan melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam.

Dijelaskan Karding, Panja bersama Pengusul RUU KKG telah menyepakati kajian aspek teknis dan azas-azas pembentukan perundang-undangan. Namun terhadap kajian aspek sub-

stantif Panja dan Pengusul masih membutuhkan pendalaman konsepsi tentang penggunaan konsep gender dalam Rancangan Undang-Undang, Kompleksivitas pengaturan mengenai *affirmative action* bagi perempuan yang telah diatur dalam undang-undang lain, dan penyelenggara tindakan KKG.

Secara umum, jelas Karding, dalam Rapat Panja telah menemukan kesepahaman konsepsi dengan Pengusul, namun masih terdapat satu catatan dari Fraksi PKS yang mengusulkan perlunya pendalaman terhadap penggunaan konsep Gender dan mengusulkan judul RUU bukan Kesetaraan Gender, tetapi RUU Pengarusutamaan Persamaan Perempuan.

Diakhir laporannya, Karding menyatakan RUU KKG sudah memenuhi persyaratan dapat di ajukan sebagai RUU Usul Inisiatif Komisi VIII DPR dan menyerahkan keputusan RUU KKG kepada Pleno Baleg, apakah RUU KKG hasil harmonisasi Panja dapat diterima? (sc) foto:naefurodji/parle/iw.

Dewan Minta Program Kemenakertrans Tidak Overlapping Dengan Kementerian Lain

Anggota Komisi IX DPR, Dewi Asmara minta program kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) Tahun 2015 tidak overlapping dengan program kementerian lain. Pasalnya, dalam Rencana Kerja Anggaran Kemenakertrans Tahun 2015 menganggarkan anggaran untuk pembangunan di daerah tertinggal dan

perbatasan.

Sepengetahuan Dewi, dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR, untuk pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan itu juga mendapatkan dana tambahan selain dana yang sudah direncanakan oleh Kementerian.

“Saya ingin tahu, didalam anggaran ini kalau memang betul kewenangan Kemenakertrans juga. Hal ini supaya tidak overlapping. Paling tidak di program boleh dianggarkan tapi ada kesesuaian,” katanya saat Rapat Kerja dengan Menakertrans, Muhaimin Iskandar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9).

Jadi, tegas Dewi, tidak ada duplikasi-duplikasi anggaran yang pada akhirnya kurang optimal untuk membangun kawasan daerah tertinggal ini.

Dirinya ingin, agar jangan sampai ada anggaran ini tersebar dimana-mana. Untuk infrastrukturnya pasti dapat. Kemudian untuk prasarana air bersih, pendidikan dan sebagainya. “Ini yang mana yang dimaksud dengan anggaran Kemenakertrans untuk anggaran daerah tertinggal dan perbatasan?” tanya politisi Fraksi Golkar ini.

Paling tidak, imbuhan Dewi, tentunya ini bisa disesuaikan. Jika untuk menambah sehingga itu menjadi lebih baik, tentu itu sesuatu hal yang positif untuk pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi IX, Dewi juga menyoroti program sinergi daerah pedesaan. Menurutnya ini sangat untuk bisa



Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara

dianggarkan. Namun agar jangan juga nanti terjadi duplikasi, dimana Undang-Undang Desa sudah di sahkan walaupun Peraturan Pemerintah belum keluar.

“Sehingga apa yang kemudian tiap desa itu mendapatkan dananya diluar itu atau *on top* daripada itu, suatu hal positif apabila juga Menakertrans memperhatikan,” ungkap anggota

DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini.

Dewi menanyakan strategi apa yang dilakukan Kemenakertrans. Apakah dengan mengembangkan sentra industrinya di daerah perbatasan agar mereka tidak perlu mencari kerja di luar negeri ataupun migrasi ke Jakarta? Ia minta jangan sampai juga nanti bertabrakan dengan UKM yang juga masuk ke desa.

Menurutnya, banyak sekali sebetulnya dana-dana dari pemerintah yang ada di desa. Dewi mengharapkan ada koordinasi antar departemen sehingga nantinya akan bermanfaat secara optimal.

“Itu yang saya minta dituangkan di dalam tataran kebijakan-kebijakan dan saya harapkan nanti tercermin di dalam anggaran yang ada,” pinta Dewi. (sc) foto: iwan armanias/parle/iw.

Kenaikan BBM Harus Ada Reasoningnya



Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat menerima Political Counselor Kedubes AS

Seandainya pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) di awal-awal pemerintahannya, hal tersebut bukan karena administrasi pemerintahan yang tidak baik, melainkan karena proses *carry over* dari pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung usai mene-

rima Kepala Politik (*Political Counselor*) Kedutaan Amerika Serikat, Mark Clark, Selasa (2/9) di ruang tamu pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

Dilanjutkannya, persoalan BBM sejatinya bukanlah persoalan yang mudah, perlu dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat luas. Mengingat postur anggaran pemerintahan mendatang yang sangat mepet (*kecil-red*). Hal ini sekaligus ujian bagi pemerintahan yang baru. Bagaimana harus melindungi masyarakat atas dampak kenaikan BBM tersebut.

“Kenaikan BBM harus ada reasoning nya. Kalau memang ruang fiskalnya masih baik atau kuat tentu kami tidak berharap untuk kenaikan BBM. Namun kondisinya saat ini ruang fiskalnya sangat sempit. Apakah kita mau negara tidak membayar gaji pegawai karena ruang fiskalnya yang sempit. Tentu disini aparat pemerintah harus efisiensi juga,” ungkap Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan.

Terkait lawatan Mark Clark, Pramono menjelaskan bahwa Amerika Serikat berharap agar pemerintahan Indonesia mendatang dapat mempertahankan bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang telah dilakukan pada pemerintahan SBY sepuluh tahun terakhir. Bahkan Amerika juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan di Indonesia. Sebagaimana komitmen Pramono selaku Ketua GOPAC (*Global Organization of Parliamentarians Against Corruption*), karena bagaimanapun juga korupsi menjadi beban yang tidak ringan bagi bangsa Indonesia.

Meski demikian dilanjutkan Pramono, Amerika sangat menghormati Indonesia termasuk tidak mencampuri masalah domestik Indonesia. Selain itu Clark juga menyambut baik keinginan Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerja sama dalam bidang pendidikan, khususnya pertukaran pelajar bagi mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ingin menimba ilmu di negeri Paman Sam tersebut. (Ayu), foto : andri/parle/eka hindra.

Setjen DPR Lakukan Persiapan dan Koordinasi Jelang Pelantikan 1 Oktober

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, dalam rangka pelantikan anggota DPR baru hasil pemilu legislatif 2014 pihaknya sudah melakukan persiapan dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), MPR, dan DPD. “Semua persiapan sudah dilakukan, dan kami juga sudah menyiapkan peta penempatan anggota DPR yang baru,” kata Win sehubungan pelantikan anggota DPR periode 2014-2019 pada tanggal 1 Oktober mendatang.



Sekjen DPR Winantuningtyastiti

Menurut Win, koordinasi dilakukan dengan ketiga instansi tersebut sebab KPU merupakan lembaga yang mengatur soal pemilihan umum legislatif. Hasil pilg itulah yang outputnya adalah anggota DPR, DPD, dan MPR. Sedangkan koordinasi dengan DPD karena akan dilantik bersamaan dengan pelantikan anggota DPR kemudian bersama-sama dilantik menjadi anggota MPR dan tempatnya di Ruang Grahasabha Paripurna.

Menyangkut persiapan penempatan ruang kerja anggota DPR yang baru, Win menjelaskan telah menyiapkan peta penempatan anggota yang disesuaikan dengan perolehan suara pemilu legislatif tanggal 9 April lalu.

Dari daftar perolehan suara yang diberikan KPU selanjutnya disesuaikan dengan posisi ruangan-ruangan kerja lantai perlantai. “Jadi memang sangat mungkin mengalami perubahan

termasuk tempat tinggal (rumah dinas) para anggota dan Pimpinan DPR, semua sudah dipersiapkan,” ia menjelaskan.

Komposisi keanggotaan Dewan hasil pemilu 2014 mengalami perubahan, jika pemilu 2009 menghasilkan keanggotaan terdiri 9 Fraksi, pada pemilu 2014 bertambah menjadi 10 fraksi. Pemenang pemilu 2009 adalah Partai Demokrat, pada pemilu 2014 ini mayoritas suara diraih Fraksi PDI Perjuangan.

Selengkapnya komposisi keanggotaan DPR periode 2014-2019 adalah PDIP beranggotaan 109 orang, FPG 91 anggota, Fraksi Gerindra 73 anggota, Fraksi PD 61 anggota, Fraksi PAN 49 anggota, Fraksi PKB 47 anggota, Fraksi PKS 40 anggota, Fraksi PPP 39 anggota, Fraksi Partai Nasdem 35 anggota, serta Fraksi Hanura 16 orang anggota (*spy, mp*), foto: *naefurodjie/parle/eka hindra*.

Komisi IV Soroti Anggaran Raskin

Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan pengadaan Raskin (Beras Miskin) dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Direksi Perum Bulog. Pembahasan mendalami Laporan Keuangan Tahun 2013 dan Rencana Anggaran Tahun 2015.

“Komisi IV mengaspresiasi Perum Bulog atas realisasi subsidi pangan tahun 2013 sebesar Rp.20.310.112.418.700,- atau mencapai 94,48%,” kata Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron dari Partai Demokrat, saat memimpin rapat tersebut, Senin (1/9), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Isu utama yang menjadi sorotan adalah tentang keterjangkauan, ketersediaan beras pokok dan juga beras miskin bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam rapat tersebut, komisi yang bertanggung jawab pada masalah pangan ini menerima usulan ang-

garan Bulog tahun 2015 sebesar Rp20.939.928.891.500,-.

Herman menjelaskan, untuk harga dan komponen lainnya tidak ada perubahan, harga tebus Rp1.600, 15 Kilogram, dan disalurkan dalam jangka durasi 12 bulan. “Anggaran yang diusulkan Rp20,9 triliun, dan ada salah satu komponen yang diusulkan dan berjalan seperti biasa belum tercantum yaitu Cadangan Beras Pemerintah (CBP),” katanya.

Masalah CBP menjadi penekanan tersendiri dalam rapat dan mendapat poris khusus dalam penganggaran Tahun 2015. CBP disiapkan untuk memberikan dukungan terhadap daerah-daerah yang mengalami krisis, bencana, operasi pasar.

“CBP adalah komponen terpenting dalam stok nasional sehingga diusulkan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah,” tegas Herman.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

Mengenai Raskin, menurutnya aman dan tidak ada masalah, namun CBP yang belum terakomodir. Tentunya yang akan terus diperjuangkan, Bulog bukan saja menjadi badan penyedia bahan pokok beras saja tetapi bisa untuk baban-bahan lainnya. “DPR ingin Bulog seperti fungsi bulog masa lalu yang bisa melayani sembilan bahan pokok,” katanya. (*as*) foto: *rizka/parle/eka hindra*.

Komisi II DPR Rekomendasikan Pansus Pilpres

Komisi II DPR akhirnya merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pilpres untuk menyelidiki sejumlah kejanggalan dalam proses pilpres 2014. Hal ini dinyatakan dalam kesimpulan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang evaluasi pilpres, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/).

“Komisi II DPR merekomendasikan pembentukan pansus pilpres dilakukan untuk melakukan penyelidikan terkait data-data pemilih, proses penghitungan dan pergerakan suara dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke KPU, serta penggunaan anggaran hingga IT yang digunakan,” kata Ketua Komisi II Agun Gunandjar Sudarsa ketika membacakan kesimpulan rapat.

Rekomendasi ini diambil setelah KPU dan Bawaslu memberikan penjelasan tentang proses pilpres hingga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil pilpres. Selain itu kesepakatan rapat juga memutuskan menerima penjelasan KPU dan Bawaslu secara umum dengan beberapa catatan. “Masih didapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan ini diharapkan menjadi referensi dalam pelaksanaan pilpres mendatang,” ujar Agun.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengatakan pembentukan pansus ini merupakan ranah politik bagi anggota dewan yang diatur dalam regulasi. Pembentukan pansus juga diharapkan mampu mengungkap seluruh dugaan praktek penyimpangan serta kecurangan dalam pemilu lalu.

“Tujuannya pansus jelas agar praktik kecurangan seperti itu tidak terulang lagi dalam pelaksanaan Pemilu berikutnya. Ini bagian dari upaya membuat pelaksanaan Pemilu agar lebih berkualitas, demokratis, transparan serta akuntabel,” ujar politisi dari PAN itu.

Dalam rapat, sebagian besar anggota Komisi II DPR menyetujui pembentukan pansus. Penolakan datang dari Fraksi PDI-Perjuangan yang diwakili Arif Wibowo. “Mewakili fraksi partai, PDI-P tidak menerima kesimpulan di angka kedua (pembentukan pansus-red). Pertama menyangkut urgensi, kedua kita tidak mau terus menerus terlibat dalam



Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa

hiruk pikuk. Kami memandang tidak ada urgensinya,” kata Arif Wibowo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR itu.

Di sisi lain, menanggapi hasil rapat evaluasi, Ketua KPU Husni Kamil Manik memandang positif adanya rekomendasi pembentukan Pansus pilpres dari Komisi II DPR, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan KPU dan Bawaslu. Bahkan dia berharap pansus bisa bekerja maksimal jika terbentuk nantinya.

“Baguslah, DPR itu penting membuat evaluasi secara menyeluruh untuk proses pemilu ini agar kemudian ada langkah lanjutan membuat peraturan perundang-undangan dengan memiliki bahan yang kuat,” ujar Husni.

Menurut dia, upaya membenahi sistem penyelenggaraan pemilu ke depan tidak akan pernah menyentuh persoalan substansial jika tidak ada upaya serius dari DPR melakukan identifikasi terhadap seluruh persoalan yang ada. “Kita berharap Pansus bekerja maksimal dalam mengevaluasi secara keseluruhan, semua proses ini bisa terjadi karena ada penyelenggara, peserta dan masyarakat, semua akan penting dicermati oleh Pansus,” ujar Husni.

Ditambahkan, sejak awal KPU secara prinsip sudah menyatakan akan kooperatif terhadap pihak manapun yang ingin mengungkap kebenaran dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sehingga persoalan substansi yang menjadi perdebatan bisa menjadi terang. (nt), foto: rizka/parle/eka hindra.

DPR Dukung Penguatan KPK

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan bahwa DPR berkomitmen mendukung penguatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam hal penyadapan,

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi forum legislatif, yang bertemakan ‘Polemik KPK, Haruskah Revisi UU?’

di Ruang Pressroom DPR, Jakarta, Selasa (2/9), hadir dalam diskusi tersebut Pakar Hukum Pidana UI Ganjar Laksamana dan Caleg terpilih dari Partai Golkar M.Misbakhun.

“Jika ada upaya-upaya mempreteli kewenangan KPK, pasti akan kita tolak. Seperti penyadapan. Justru, penyadapan itu yang paling ditakuti oleh koruptor. Dan, KPK



Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat dalam acara Forum Legislasi

dalam perkembangan terakhir ini sudah menunjukkan kewibawaannya agar Indonesia menjadi negara hukum yang bebas dari korupsi,” tegas Martin.

Ia menambahkan, dalam hal penyadapan perlu ada pengawasan internal. “Ada sekitar 62 ribu surat pengaduan yang masuk, namun hanya ratusan yang ditindaklanjuti

oleh KPK,” ujarnya.

Lebih lanjut, Martin menjelaskan, tak ada upaya DPR untuk melemahkan KPK. Termasuk dalam pasal 245 (1) UU MD3 di mana pemeriksaan anggota DPR RI harus memiliki izin dari Mahkamah Kehormatan DPR, hal itu ada pengecualiannya.

Menurutnya, jika dalam kasus tertangkap tangan, tindak pidana mati atau tindak pidana khusus seperti korupsi, UU ini justru memperjelas peran KPK yang bisa langsung memeriksa anggota DPR RI tanpa izin MK dan DPR RI. “Jadi, tak ada hak imunitas anggota DPR RI dalam penegakan hukum itu,” terangnya

Hal senada dikatakan oleh Misbakhun, menurutnya kita semua harus sepakat dan menyamakan persepsi bahwa pemberantasan korupsi itu menjadi agenda bersama, namun proses yang dilakukan harus transparan, karena KPK itu milik bersama dan bukan milik kelompok tertentu.

“Karena itu kalau ada revisi UU jangan dicurigai berlebihan dan justru kalau ada kriminalisasi KPK masyarakat pasti melawan,” terangnya. (nt/sc)/foto:andri/parle/iw.

Moratorium Dicabut, Jika Aturan Ketenagakerjaan Kuwait Jelas

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Ekonomi dan Keuangan, Mohamad Sohibul Iman menerima delegasi Parlemen Kuwait, Senin (1/9) di ruang pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut mengemuka beberapa isu penting yang menjadi konsentrasi kedua negara, Indonesia dan Kuwait, selain isu Palestina yang tengah menghangat beberapa bulan terakhir.

“Selain isu tentang Palestina dan pencabutan moratorium TKI ke Kuwait. Mereka meminta moratorium tersebut dicabut, karena Kuwait masih membutuhkan banyak TKI untuk berbagai industri di negaranya. Parlemen Kuwait juga mempertanyakan kenapa moratorium TKI ke negara lain sudah dicabut namun untuk Kuwait dan Arab Saudi belum juga dicabut,” jelas Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman.

Dijelaskan Sohibul bahwa pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan moratorium TKI ke Kuwait namun dengan syarat negara Kuwait juga terlebih dahulu harus memiliki komitmen yang kuat untuk memperbaiki kondisi TKI di nega-



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menerima delegasi Parlemen Kuwait

ra tersebut. Peralnya sebagaimana diketahui tidak sedikit TKI yang mendapat perlakuan tidak mengenakan di negara tersebut. Oleh karenanya Sohibul berharap Kuwait dapat membuat peraturan mengenai ketenagakerjaan khususnya bagi TKI, selain tentunya yang juga harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan TKI.

“Kami akan mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut moratorium TKI ke Kuwait jika aturan ketenagakerjaan di Kuwait jelas, artinya pemerintah Kuwait telah memiliki Peraturan atau undang-undang ketenagakerjaan asing yang jelas, sehingga TKI akan terlindungi di negara tersebut,” ungkap politisi dari Fraksi

PKS ini.

Menjawab hal tersebut, Ketua Delegasi Parlemen Kuwait, Khalil Abdullah Ali Abdullah mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah menyusun rancangan UU Ketenagakerjaan domestik yang nantinya akan mengatur hak dan kewajiban pekerja dan majikan. Namun saat ini peraturan atau UU tersebut belum disahkan mengingat masih ada perdebatan terkait upah regional. Selain itu Kuwait juga tengah membuat badan ketenagakerjaan asing yang

diharapkan lebih spesifik mengurus masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dengan demikian TKI khususnya yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga akan semakin terlindungi hak-haknya. Selain itu Khalil juga berharap agar ke depan Indonesia tidak hanya mengirimkan TKI yang khusus dikirim untuk menjadi asisten rumah tangga, melainkan juga tenaga-tenaga profesional lainnya yang membutuhkan keahlian khusus.

Terkait dengan harapan Kuwait agar Indonesia juga mengirimkan tenaga-tenaga profesional di bidang lainnya tersebut, menurut Sohbul hal itu menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia di negara lain. Terutama yang harus dipersiapkan adalah bahasa, karena bahasa akan membuat komunikasi menjadi lancar dan mudah. Selain itu tentunya skill atau keterampilan yang juga harus dipersiapkan oleh tenaga kerja Indonesia. (Ayu), foto : andri/parle/eka hindra.

DPR Mendatang Perlu Wujudkan Panggung Demokrasi

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, panggung rakyat sebagai mimbar demokrasi harus bisa diwujudkan DPR yang akan datang. Paling tidak satu hari dalam sepekan, perlu disiapkan waktu oleh DPR untuk menerima aspirasi atau pengaduan masyarakat.

“Dengan demikian kalau masyarakat atau mahasiswa demo tidak usah di jalan dan merobohkan pagar, tetapi bisa diterima di panggung demokrasi,” katanya saat memberikan sambutan pada pagelaran wayang kulit di DPR Sabtu (30/8) malam lalu.

Karena itu Priyo berharap, DPR periode mendatang bisa merealisasikan panggung demokrasi tersebut. DPR berbeda dengan parlemen negara-negara lain yang penuh dengan sekat-sekat sehingga tidak semua kalangan masyarakat bisa menemui wakil-wakilnya, tetapi DPR adalah rumah rakyat.

Ditemui di sela-sela acara pertunjukan wayang tersebut, Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengapresiasi usulan Wakil Ketua DPR tersebut. Sebetulnya panggung demokrasi pernah disiapkan di lokasi samping Gedung Nusantara I, hanya saja masyarakat yang datang ke DPR tidak mau menggunakannya dengan alasan jauh dari nara sumber yang diinginkan.

“Alasannya terlalu jauh dan tidak berhadapan langsung dengan anggota maupun Pimpinan DPR,” tandas Win de-



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso berjabat tangan dengan dalam Ki Kukuh Bayu Aji

ngan menambahkan, sudah menjadi kebiasaan pendemo datang ke DPR selalu ingin dialog dengan Pimpinan Dewan, Pimpinan KomisiatuFraksi.

Dalam kaitan ini lanjut dia, pihak Kesekjen sudah mencari solusi bagaimana nantinya menyiapkan tempat yang lebih strategis mungkin di depan gedung bukan dibelakang lagi, karena biasanya yang berdemo itu maunya diliput dan ditonton orang. (spy,mp), foto: andri, rizka/parle/eka hindra.

Dewan Usul Relokasi PIP Semarang

Tingginya animo masyarakat yang ingin belajar di sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) di Semarang tidak sebanding dengan jumlah murid yang diterima karena keterbatasan fasilitas ruang kelas dan asrama. Pasalnya lokasi PIP Semarang berada di tengah kota dan tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan.

Anggota Komisi V DPR, Epyardi Asda mengusulkan PIP Semarang untuk direlokasi. Hal tersebut, disampaikan Epyardi saat pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V dipimpin Lasarus dengan Kepala BPSDM Kementerian Perhubungan Wahyu Satrio Utomo dan Direktur PIP Semarang, M. Chairul Djohansyah di PIP Semarang, bebera-

pa hari lalu.

“Saya melihat bahwa sekolah ini lokasinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikembangkan, ini persis sama dengan sekolah-sekolah lain. Contohnya AIP yang dulunya di Ancol dikembangkan ke Marunda. Pasalnya jika ditengah kota pengembangannya

susah,” jelas politisi dari Parta Persatuan Pembangunan.

Seharusnya, kata Epyardi, relokasi ini sudah menjadi pemikiran bagi yang bertanggung jawab terhadap PIP Semarang. Pasalnya, sebagaimana diketahui sekolah kejuruan atau akademik kejuruan yang sangat bisa membantu secara langsung contohnya adalah sekolah pelayaran.

“Saya sebagai almamater dan saat ini menjadi Anggota DPR selalu membicarakan ini baik dengan Menteri Perhubungan maupun dengan Kepala BPSDM,” jelasnya.

Ia menyadari bahwa sekolah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena lulusan PIP Semarang merupakan lulusan siap pakai. Ia juga mengakui bahwa DPR yang berkunjung ke PIP baru saat ini, sebelum-sebelumnya belum ada.

“Kita menyadari sekolah ini sangat



Anggota Komisi V DPR Epyardi Asda

dibutuhkan oleh masyarakat, karena seperti disampaikan Direktur PIP Semarang yaitu *Supply* dan *Demand*-nya itu cukup tinggi. Dimana lebih banyak *demand*-nya daripada *supply*-nya, sehingga ada jaminan lulusan PIP Semarang bisa langsung bekerja. Hanya negara kita saat ini sedang ada keterbatasan dana, tetapi seandainya ada proposal yang jelas, ada masukan

yang pasti dari PIP Semarang saya rasa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” papar Epyardi.

Ditegaskan Epyardi, bahwa dirinya yakin teman-teman politisi di Komisi DPR akan mendukung usulannya ini jika memang betul-betul dan bermanfaat untuk PIP Semarang.

“Saya berharap kepada Direktur PIP dan Kepala BPSDM untuk membuat proposal yang jelas kemana sekolah ini kemungkinannya bisa direlokasi. Kalau disini tidak mungkin pengembangannya. Karena satu-satunya jalan adalah relokasi, untuk relokasi harus ada proposal yang jelas dari PIP dan BPSDM sehingga nantinya itu bisa dikembangkan,” harapnya.

Epyardi berjanji sebagai almamater PIP Semarang dan sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi V dan Badan Anggaran siap untuk memperjuangkan ini. (sc), foto suciati/parle/eka hindra.

DPR Terima Kado Istimewa Pada HUT-69

Di hari ulang tahun DPR ke-69, DPR meluncurkan dua buku berisi kegiatan DPR dalam setahun terakhir, berjudul *Warna-warni DPR* dan *Kicauan Senayan*. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, hal ini sebagai kado istimewa di hari ulang tahun DPR. Buku ini disusun oleh segenap wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan DPR RI.

“Hari ini segenap Pimpinan dan Anggota DPR RI dan Setjen DPR merasa beruntung pada ulang tahun ke-69 kami mendapatkan kartu istimewa dari *Press Room*, dua buku karya *genuine*, atau karya teman-teman *Press Room* yang selama 24 jam ini konsentrasi untuk bertugas di lingkungan DPR RI. Atas nama pimpinan, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya,” kata Priyo, saat memberikan sambutan peluncuran buku, di loby Gedung Nusantara II, Jumat (29/08).

Politisi Golkar ini menambahkan, hal ini menjadi tradisi yang baik untuk periode berikutnya, sehingga mewariskan karya yang dapat dinikmati sampai anak cucu. Menurutnya, untuk



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso didampingi Pejabat Setjen DPR dan Pengurus Wartawan Koordinatoriat DPR

mengetahui situasi DPR dalam 5 tahun ini, bisa cukup dengan membaca buku ini.

Sementara itu, Ketua Koordinatoriat Wartawan DPR RI Jaka Suryo menyatakan, gagasan ini muncul karena

selama ini banyak ide yang belum ditampung dan dibukukan. Gagasan ini mendapat dukungan dari Setjen DPR untuk disusun menjadi buku.

“Buku ini akan menjadi warisan yang berharga untuk siapapun. Saya kira,

buku ini yang pertama kali menampilkan sebuah lembaga dalam bentuk fotografi dan jurnalistik, yang dibuat oleh teman-teman wartawan yang bertugas di sini, sehingga sudut pandangnya akan berbeda, terimakasih untuk semua pihak yang telah mendukung,” ujar Jaka.

Di akhir acara, Jaka Suryo menyerahkan

kan dua buku tersebut secara simbolis kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Anggota Komisi III Ahmad Yani, Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Wasekjen DPR Achmad Djuned, Kepala Biro Humas dan Pemberitaan Djaka Dwi Winarko, dan wartawan senior Khaerul Habiba.

Dalam komentar di cover belakang

buku Kicauan Senayan, Priyo mengatakan buku ini memotret berbagai gelombang pasang peristiwa besar di DPR. Buku ini juga mengupas tuntas berbagai isu-isu paling hangat dari ide-ide brilian para tokoh. Ia menegaskan, buku ini sangat layak dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. (sf), foto : iwan armanias/parle/iw.

Delegasi Parlemen Kuwait Dukung Nurhayati Ali Assegaf

Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf mendapat dukungan Delegasi Parlemen Kuwait yang akan dicalonkan sebagai Presiden Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia pada sidangnya Oktober mendatang di Swiss. Hal tersebut mengemuka pada acara pertemuan persahabatan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR-Parlemen Kuwait dipimpin Ketuanya Teuku Irwan di Jakarta, Senin (1/9). Delegasi Parlemen Kuwait terdiri lima orang dipimpin Khalil Abdullah Ali Abdullah.

Pada pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit dan dalam suasana penuh persahabatan dan keakraban tersebut, Teuku Irwan meminta dukungan Parlemen Kuwait bagi pencalonan anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU dalam sidangnya di Swiss bulan depan.

Menanggapi hal itu, Khalil Abdullah mengharapkan, pencalonan tersebut hendaknya jangan menjadi target, tetapi hendaknya menjadi jembatan untuk meluruskan pandangan barat atas Islam seolah-olah identik dengan kekerasan dan radikalisme. “Pencalonan itu diharapkan agar memperbaiki citra Islam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Anggota BKSAP DPR Hidayat Nurwahid menilai, pencalonan Nurhayati memiliki makna penting, yaitu untuk mengoreksi salah paham pandangan negara barat yang selalu menilai negatif Islam termasuk negara-negara Islam. Seolah-olah Islam itu tidak demokratis, Islam itu kekerasan dan seolah-olah Islam kalau berdemokrasi tidak berkualitas.

Politisi PKS ini berharap, Nurhayati akan bisa menjadi



Ketua GKSB DPR Teuku Irwan berjabat tangan dengan Delegasi Parlemen Kuwait

jawaban konkret bahwa seorang perempuan muslimah bisa berdemokrasi dengan cara tidak meninggalkan keislamannya. Dengan cara itu diharapkan salah paham bisa dikoreksi, sehingga ketegangan antara barat dan timur dan juga antara barat dan Islam bisa dikoreksi.

Delegasi Parlemen Kuwait menurut dia, intinya mendukung, namun karena bukan pengambil keputusan, maka akan disampaikan kepada Pimpinan Parlemen Kuwait. Dia juga berharap, masalah tersebut bisa disampaikan rekannya di parlemen negara-negara Arab dan negara-negara Teluk untuk mendukung Nurhayati pada Sidang IPU di Swiss pertengahan Oktober 2014 yang akan datang. (mp), foto : naefurodjie/parle/eka hindra.

Prihatin Upwelling, Komisi IV Tinjau Danau Maninjau

Komisi IV DPR RI meninjau karamba budi daya ikan air tawar di Danau Maninjau yang bulan Agustus lalu terkena musibah *upwelling* atau umbalan massa air yang menyebabkan 450 ton ikan mati. Sejumlah langkah perlu di-

lakukan agar bencana seperti ini bisa diantisipasi dan kerugian bisa ditekan.

“Fenomena *upwelling* di Danau Maninjau ini biasa tapi jangan dianggap hal biasa karena telah mengaki-

batkan banyak kerugian. Bagi Komisi IV ini adalah hal serius, kita datang kesini bukan hanya untuk meninjau dan mendengar, tapi juga mendorong pemerintah bekerja sama dengan pemda mencegah ini terjadi kembali,”



kata Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV Herman Khaeron di Maninjau, Sumbar, Kamis (28/8/14).

Ia mengaku prihatin karena dalam tahun ini bencana sudah terjadi sebanyak tiga kali mengakibatkan kerugian puluhan miliar rupiah. Pemerintah perlu mengambil langkah karena kasus seperti ini terjadi tidak hanya di Maninjau tetapi juga di sejumlah danau lain di Indonesia.

Dalam kesempatan itu Tim Kunjungan Komisi IV diantaranya Rosyid Hidayat (FPD), Dewi Coryati (FPAN) dan Anak Agung Jelantik Sanjaya (FP- Gerindra) berdialog dengan para pembudi daya ikan yang sebagian berasal dari Kecamatan Koto Malintang, Kab. Agam.

Secara khusus Anak Agung Jelantik mengingatkan agar usaha budi daya disekitar danau memprioritaskan penduduk setempat. Masyarakat yang berusaha di sekitar danau agar bekerja berdasarkan zona yang telah ditetapkan dan tetap menjaga ekosistem.

“Kegiatan budi daya ini harus mengutamakan rakyat sekitar. Kalau melibatkan pengusaha dalam luas dan skala tertentu harus memiliki izin usaha perikanan,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Bali ini.



Tim Kunker Komisi IV DPR kunjungi Danau Maninjau

Pertemuan yang berlangsung di pinggir danau Maninjau itu berlangsung dinamis terutama setelah masyarakat menyampaikan aspirasinya. Raswar dari kelompok Budi Daya Ikan Sepakat meminta DPR mendukung upaya bantuan dana terutama pasca bencana.

“Kami menanggung kerugian cukup besar pasca bencana *upwelling*, kita sulit untuk berusaha lagi karena ketiadaan modal untuk membeli bibit.

Kami berharap ada dukungan dari DPR,” ujar dia.

Sementara itu Yuliharnita meminta pemerintah menyediakan pompa penyedot lumpur danau Maninjau. Upaya ini penting untuk mengatasi masalah pendangkalan dan polusi sampah di dasar danau. Ia juga meminta pemerintah memfasilitasi bimbingan bagaimana mengolah lumpur danau sebagai bahan baku pupuk organik. *(iky) foto: ical/parle/iw.*

DPR Apresiasi Kemenhub Cetak Tenaga Terampil Kelautan dan Penerbangan



Tim Kunker Komisi V DPR menuju lokasi pertemuan BPSDM Kemenhub Makassar

Sekolah Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) dan Sekolah Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Sulawesi Selatan mendapat kunjungan Komisi V DPR. Dalam Kunjungan Spesifik Komisi V DPR ini bertujuan memantau masalah anggaran khususnya untuk Sekolah Kedinasan Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Kementerian Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Komisi V DPR H. Muhidin M Said mengemukakan hal itu saat memimpin Tim Kunjungan Spesifik ke Sekolah Kedinasan BPSDM Kemenhub Makassar diterima Direktur ATKP Heri

Sudarmaji Rabu (27/8) lalu.

Ketua Tim Muhidin M Said mengatakan, anggaran yang dikelola oleh Kemenhub sangat luar biasa. Artinya sekolah-sekolah yang dibina oleh BPSDM yang betul-betul menjadi kebutuhan pasar, apakah itu pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

“Jika kita tingkatkan dan dikembangkan ini sangat luar biasa. Baik kebutuhan tenaga kerja bidang kelautan maupun penerbangan, contoh di Makasar. Daya tampung sangat terbatas dan peminat cukup besar padahal pasar

yang membutuhkan mereka peluangnya besar,” jelasnya.

Dikatakan Muhidin, kalau peluang ini dimanfaatkan maka bisa meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja dan mampu bersaing dengan negara asing sekalipun, dan pada gilirannya dapat meningkatkan devisa.

“Dengan mengirim pelaut keluar negeri dengan gaji kurang lebih tujuh ribu US dolar dapat memberikan gengsi negara kita karena yang dikirim adalah tenaga-tenaga terampil yang cukup handal serta kompetitif sehingga

mampu bersaing secara global,” ujarnya lagi.

Dengan mengirim tenaga terampil, kata Muhidin, maka akan meningkatkan derajat dan martabat bangsa, karenanya Komisi V DPR memandang perlu untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Di sisi lain, perlu dorongan pembiayaan sehingga perlu diberikan pemahaman kepada Kemenhub saat pembahasan anggaran. Dengan demikian target yang akan dicapai untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil bisa diwujudkan. (spy)/
foto:supriyanto/parle/iw.

BPPTD Bali Butuh Banyak Tenaga Pengajar



Tim Kunker Komisi V DPR mengunjungi BPPTD Bali

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Anton S Tampubolon mengatakan bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali membutuhkan banyak tenaga pengajar.

“Kendala yang kami lihat di BPPTD Bali ini adalah kurangnya jumlah pengajar, sedangkan nanti tahun 2015 akan ‘booming’ Balai Diklat dan Sekolah Tinggi perhubungan, seperti yang sudah dilaporkan Kepala BPPTD Bali, Pak Salman, dilaporkan 2 ribu yang mendaftar, tapi kami hanya mampu 9 ratus, 1100 nya kami tidak mampu menerima,” jelas Anton dihadapan rombongan Tim Kunker Komisi V DPR, Kamis, (28/8).

Ia menambahkan, tahun 2015 juga UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) akan berlaku, dan semua PNS harus berkompeten disemua bidang, “Tahun 2015 UU ASN berlaku, dan PNS semua harus kompeten, baik di terminal, jalan, tempat pengujian dan sebagainya, nah mereka itu kan nantinya akan sekolah disini tidak lagi didaerah, untuk itu kendala kami ialah jumlah pengajar,” tegasnya.

Oleh karena itu, tambahnya, karena jumlah pengajar yang direkrut terbatas formasinya, maka Balai Diklat ini meminjam tenaga pengajar dari Perguruan Tinggi, dan Dirjen Perhubungan, serta praktisi.

Selain itu, Anton juga melaporkan, bahwa dalam hal anggaran juga masih dibutuhkan banyak, terlebih lagi untuk laboratorium dan simulator

Dalam penjelasannya, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Bali kampus ini memiliki peran yaitu untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan Darat melalui 2 jalur.

Jalur pertama adalah pendidikan tinggi, hingga saat ini DPPTD Bali memiliki program studi D2 pengujian kendaraan bermotor yang lulusannya nanti adalah memiliki kompetensi menguji kendaraan bermotor wajib uji seluruh Indonesia,

“Sedangkan jalur kedua adalah pembangunan SDM Perhubungan Darat melalui pelatihan teknis pada bidang perhubungan darat dari mulai bidang perencanaan transportasi, manajemen rekayasa lalu lintas, angkutan umum, pengujian kendaraan bermotor dan keselamatan transportasi jalan,” terangnya.

Seperti diketahui, jelas Anton, dalam era Otda ini terdapat kurang lebih 534 provinsi kabupaten kota, yang jumlah aparat perhubungan darat seluruhnya adalah 29 ribu seluruhnya, “Itulah yang diberi tugas kepada kami dan kami bagi peran pada kampus-kampus kami yaitu di Palembang khusus yang menangani ASDP, di STTD khusus menangani perguruan tinggi transportasi darat dan diklat teknis, di Madiun Perkereta Apian, di Bali manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan umum, dan terakhir di Tegal khusus mengenai politeknik keselamatan transportasi jalan,” ujarnya.

“Saya kira dengan 29 ribu aparat pemerintah daerah yang harus memiliki kompetensi dan diklatnya tidak hanya sekali tetapi setiap periode waktu harus ditingkatkan, dan memerlukan balai-balai diklat seperti yang ada di Bali, untuk itu, saya mohon arahan, pembinaan sehingga peran kami bisa berfungsi dengan baik,” katanya mengakhiri paparannya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPR selaku pimpinan Tim Kunker Komisi V DPR Teguh Juwarno mengatakan, kedata-

ngan dewan kali ini untuk mendapatkan informasi yang utuh, dan terutama untuk melihat langsung penyelenggaraan pendidikan pelatihan di Balai BPPTD.

“Kami juga kami ingin mendengar tantangan hambatan dan harapan kedepan karena dalam kapasitas kewenangan parlemen, kita punya hak konstitusional untuk kemudian memberikan dalam bentuk dukungan dan support agar bagaimana

pengembangan SDM ini betul betul kedepannya, menjadi salah satu yang harus lebih diperhatikan, kenapa? karena menurut saya pada akhirnya teknologi boleh hebat, peralatan boleh lengkap, tapi kalau kemudian yang mengoperasikan tidak punya hati maka kemudian alat dan peralatan itu akan bisa menjadi alat yang menyebabkan kerusakan,” harap Teguh yang juga politis dari F-PAN ini. (nt), foto: nita juwita/parle/eka hindra.

Komisi V Minta Jenjang Pendidikan PIP Semarang Ditingkatkan



Tim Kunjungan spesifik Komisi V DPR saat meninjau PIP Semarang

Arah kebijakan Presiden baru salah satunya adalah menitikberatkan pada negara maritim, dimana bobot transportasi laut menjadi lebih besar. Berarti armada kapal menjadi lebih banyak dan otomatis armada kapal ini membutuhkan operator dengan keahliannya masing-masing.

Operator dengan keahlian masing-masing ini perlu di didik, di sekolahkan dan yang baru memiliki sekolah ini baru pemerintah lewat Kementerian Perhubungan.

“Jadi tidak hanya sudah saatnya, tapi memang harus ada peningkatan stock

atau kebutuhan tenaga-tenaga operator itu dipercepat, yaitu dengan memperluas jumlah penerimaan, peningkatan jenjang pendidikan tidak hanya pada tingkat D-III tapi juga S1 kemudian sampai S2,” papar Anggota Komisi V DPR, Sudjadi usai pertemuan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR dengan Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan jajarannya di Semarang, Rabu (27/8) lalu.

Menurut Sudjadi, armada laut butuh tenaga operator, pemerintah harus *link and match* dengan pendidikan di bidang operator pelayaran, dan kebutuhan tenaga kenavigasian atau tenaga

yang kaitannya dengan angkutan laut dipercepat.

Ia menyatakan, bahwa animo masyarakat yang ingin masuk ke sekolah PIP Semarang cukup tinggi, namun tempatnya di dalam kota dan suasana bahari tidak kelihatan. Maka relokasi PIP sangat diperlukan. Tapi yang menjadi masalah adalah biaya.

“Tapi kalau itu memang urgent sekali di bidang kelautan, kenapa tidak? Apalagi nanti Presiden baru itu programnya pendidikan dikaitkan dengan pendidikan kelautan, dikaitkan dengan tenaga kenakhodaan, ya nyambung,” tukas politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk itu, kata Sudjadi, kebutuhan SDM di PIP harus simultan, harus disiapkan dan untuk menutupi kekurangan yaitu dengan merekrut tenaga yang sudah pensiun. “Tadi ada ide dari Direktur PIP semacam *outsourcing* atau kontrak, kenapa tidak kalau bisa,” tegasnya.

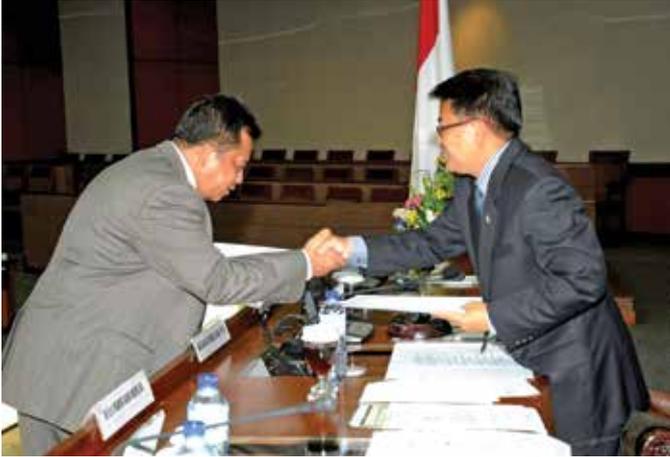
“Jika sifatnya *emergency*, ya harus bisa dengan cara-cara ada namanya *outsourcing*, ada namanya kontrak, kan banyak para pensiunan-pensiunan yang berprestasi yang perlu diberdayakan. Saya setuju kalau untuk itu,” imbuh Sudjadi. (sc), foto: suciati/parle/eka hindra.

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2013

Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2013 untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian dilaporkan Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjiyanto saat

Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kamis (4/9). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman.

“Kami laporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI



Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menerima laporan Wakil Ketua Banggar

dengan Menteri Keuangan bahwa seluruh Fraksi DPR dapat menyetujui atau menerima RUU Pelaksanaan APBN 2013 untuk disahkan menjadi UU,” kata Djoko.

Dalam laporannya, Djoko menyatakan bahwa pada 28 Mei 2014 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2013 kepada DPR RI. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2013. Perolehan ini masih sama dengan opini

LKPP tahun 2012.

“Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP sebanyak 32 masalah. Terdiri dari Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 23 masalah, dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak 9 masalah,” jelas Djoko.

Namun, tambah Politisi Demokrat ini, penyebab utama opini WDP adalah permasalahan piutang bukan pajak dan permasalahan saldo anggaran lebih (SAL). Permasalahan piutang bukan pajak yaitu permasalahan piutang *over lifting* dan hasil penjualan gas bumi, permasalahan terkait aset kredit eks BPPN, dan permasalahan piutang saldo dana belanja pensiun.

“Sedangkan, permasalahan SAL, penelitian atas selisih antara catatan SAL dengan fisiknya belum memadai dan terdapat perbedaan pengakuan belanja antara catatan Bendahara Umum Negara (BUN), serta terdapat selisih absolut transaksi kiriman uang sebesar Rp 3,5 triliun yang belum dapat dijelaskan,” jelas politisi asal Dapil Jawa Tengah ini.

Permasalahan SAL yang terakhir adalah terdapat perbedaan fisik SAL yang dikelola kementerian atau lembaga antara catatan BUN dengan catatan kementerian atau lembaga. (sf) foto: iwan armanias/parle.



Panja JIS Komisi III DPR memberi keterangan pers di ruang Kepala Rutan Cipinang

Panitia Kerja (Panja) Jakarta International School (JIS), Komisi III DPR RI memastikan kondisi para tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak di JIS tersebut sehat dan siap mengikuti proses persidangan.

Demikian disampaikan Ketua Panja JIS, Komisi III, Al Muzammil Yusuf dalam konferensi pers di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta, Kamis, (4/9). Setelah mendatangi JIS beberapa waktu lalu, Komisi III berkunjung ke Rutan Cipinang untuk bertemu dengan 4 dari 5 tersangka kasus JIS. Kasus ini telah menyita perhatian publik nasional maupun internasional.

“Hari ini kami datang ke Rutan untuk melihat 4 dari 5 tersangka. Kami bertemu mereka untuk melihat bagaimana kesehatan mereka, karena persidangan sudah dimulai. Kami ingin memastikan bahwa mereka bisa mengikuti persidang-

Para Tersangka Kasus JIS Siap Ikuti Persidangan

an. Sekali lagi karena ini kasus internasional, mungkin persidangan akan panjang. Alhamdulillah setelah kami melihat, mereka dalam kondisi baik, sehat wal afiat,” ungkap Al Muzammil.

Hadir dalam kunjungan tersebut para anggota Panja JIS Komisi III seperti Venna Melinda (F-PD), Himatul Alyah Setiawaty (F-PD), Adang Daradjatun (F-PKS), Nasir Jamil (F-PKS), Andi Rio Idris (F-PG), dan Martin Hutabarat (F-Gerindra). Turut serta dalam rombongan tersebut tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sengaja diundang oleh Komisi III DPR. Rombongan Komisi III itu diterima Kepala Rutan Cipinang Agus Heryanto.

Lebih lanjut Al Muzammil menuturkan, kunjungan ini merupakan hak konstitusional dewan untuk mengetahui lebih banyak kasus yang sedang menjadi perhatian publik. “Semua pihak terkait harus kami dengar keterangannya. Tapi, karena proses hukum sedang berjalan, tentu tidak selayaknya kami mencampuri urusan hukumnya,” tandas Al Muzammil lagi.

Sementara itu, Adang Daradjatun juga menambahkan bahwa pelayanan dan keamanan di Rutan Cipinang sangat baik. Para tersangka kasus JIS tidak mengalami masalah apa pun. “Dari hasil kami berbicara dengan mereka (para tersangka), terus terang saja pelayanan dan keamanan di sini baik. Saya lihat tidak ada masalah yang dia sampaikan,” imbuh Adang, mengakhiri konferensi pers. (mh) foto: husen/parle/iw.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyerahkan Wayang kepada Dalang Kukuh Bayu Aji

Pagelaran Wayang Kulit Sambut HUT-69 DPR Berlangsung Meriah

Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk dalam rangka menyambut HUT-69 DPR yang berlangsung Sabtu-Minggu (30-31/8) di Lapangan Sepak Bola kompleks Parlemen Senayan, berlangsung meriah. Kemeriahan dan semarak pertunjukan salah satu budaya nasional ini ditunjukkan kehadiran masyarakat yang memenuhi arena yang disiapkan dan mengikuti hingga akhir acara pukul 04.00 pagi.

Acara semakin meriah dengan tampilnya dalang muda asal Banyumas Ki Kukuh Bayu Aji diselingi pelawak Kirun asal Jawa Timur dan dua pelawak asal Banyuwang Klowor dan Dower. Ketiga pelawak ini mengocok perut penonton pada sesi goro-goro, menjadikan masyarakat tetap mengikuti jalannya cerita yang kali ini mengambil lakon Wahyu Manunggal Jati.

Suasana pertunjukan malam itu benar-benar menggambarkan kedekatan rakyat dengan para wakilnya di DPR.

Sebagaimana sambutan Ketua Panitia Tjatur Sapto Edy dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bahwa DPR memang bertekad menjadikan Gedung DPR sebagai rumah rakyat, sehingga tidak ada sekat-sekat antara rakyat dengan wakilnya. "Siapapun, masyarakat dari kalangan manapun bisa datang menemui para wakilnya di Senayan," tegas Priyo yang disambut antusias penonton.

Terlebih lagi pernyataan Tjatur Sapto Edy bahwa DPR tetap akan tetap meneruskan pertunjukan wayang kulit ini. Bahkan kalau bisa setahun dua kali, pada saat memperingati HUT DPR dan peringatan satu Muharram (1 Syuro). "Pertunjukan wayang kulit akan tetap digelar sebagai salah satu upaya *uri-uri* (melestarikan) budaya bangsa," tuturnya yang juga disambut meriah para penonton.

Pertunjukan wayang kulit di DPR kali ini merupakan pagelaran yang ke 42.

Menurut Priyo, selama pertunjukan wayang kulit ini semua dalang kondang pernah diundang dari Anom Suroto, Manteb Sudarsono maupun dalang "edan" Ki Entus Susmono, kali ini diundang dalang dari Banyumasan Ki Kukuh Bayu Aji.

Suasana Banyumasan mewarnai pagelaran wayang kulit ini antara lain 8 orang pesinden dengan logat *ngapak-ngapaknya*, selingan Tari Lenggèr dan hidangan yang disediakan panitia soto Sokaraja, bakmi Jawa dan tempe mendan. Pagelaran ini juga mendapat perhatian diplomat negara sahabat dengan hadirnya Dubes Thailand dan Laos serta Ketua Umum Persatuan Dalang Indonesia serta Presiden Wayang Se dunia. Pertunjukan diawali secara simbolis penyerahan wayang kulit dari Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada Ki Dalang Kukuh Bayu Aji. (mp),
foto : andri, rizka/parle/eka hindra.



Komisi VII DPR RI dan Menteri Lingkungan Hidup menandatangani naskah RUU Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas yang akan disahkan di Rapat Paripurna DPR. Rabu (3/9) Foto : Iwan Armanias/Parle



Tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi Herman Khaeron meninjau Konservasi Penyu di Danau Maninjau di Sumatera Barat. Kamis (28/8) Foto : Ical/Parle/Iw.



Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Muhidin M. Said saat mengunjungi Sekolah Kedinasan Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan, di Makassar, Sulawesi Selatan. Rabu (27/8). Foto: Supri/Parle/Iw.